

ABSTRAK

Kabupaten Kayong Utara khususnya yang bertempat tinggal di pesisir pantai, nelayan merupakan mata pencaharian yang dominan. Hasil tangkapan mereka selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam mencari ikan masyarakat Kabupaten Kayong Utara menggunakan berbagai macam alat penangkapan ikan seperti pancing, jala, jaring, bubu dan juga rawai. Namun ada sebagian masyarakat Kabupaten Kayong Utara dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal seperti pukot hela (*trawls*). Apa yang dilakukan masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti pukot hela (*trawls*) ini tentunya dapat merusak ekosistem dan keberlanjutan sumber daya ikan yang ada dibawah laut Kabupaten Kayong Utara.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Demi terwujudnya ketertiban dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat maka diciptakan suatu produk hukum yang tertulis, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kehidupan menuju terciptanya ketertiban keadilan dan kenyamanan dalam masyarakat. Dalam menjalankan produk hukum tertulis tersebut sifat aparat penegak hukum harus pro aktif dalam penegakan hukum yang telah dibuat dan memenuhi unsur-unsur agar dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, hal ini membuktikan bahwa antara hukum dan aparat penegak hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Perbuatan penangkapan ikan dengan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana, karena telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Kata Kunci : ekosistem, perikanan, penangkapan ikan ilegal, produk hukum,

ABSTRACT

North Kayong Regency, especially those living on the coast, fishermen are the dominant livelihood. Their catch is not only for consumption. They also sell it to meet their daily economic needs. In looking for fish, the people of North Kayong Regency use a variety of fishing tools such as fishing rods, nets, traps, and longlines. However, there are some people in North Kayong Regency who are catching fish using illegal fishing gear such as trawls. What is done by the people of North Kayong Regency who use illegal fishing gear such as trawls can certainly damage the ecosystem and the sustainability of fish resources under the sea in North Kayong Regency.

The implementation of law enforcement in the field of fisheries is very important and strategic in order to support the development of fisheries in a controlled manner and in accordance with the principles of fisheries management. So, the fishery development can run in a sustainable manner. For the sake of the realization of order and comfort in carrying out social life, a written legal product was created, namely in the form of laws and regulations governing the order of life towards the creation of order, justice and comfort in society. In carrying out the written legal product, the nature of law enforcement officers must be pro-active in enforcing the law that has been made and fulfill the elements so that it can be obeyed by citizen. This proves that the law and law enforcement officers are inseparable.

The act of catching fish with tools and/or methods that can harm and/or endanger the preservation of fish resources and/or the environment is categorized as an act or a criminal act, because it has violated the provisions contained in Law Number 45 of 2009 amendments to Law No. Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.

Keywords : ecosystem, fisheries, illegal fishing, legal product,